

SUBALTERN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN REKLAMASI PANTAI DI KOTA MAKASSAR

Ismah Tita Ruslin

Dosen Pada Prodi Ilmu Politik

UIN Alauddin Makassar

E-mail: ismahtitaruslin78@gmail.com

Abstract

This article reflects the role of fishermen as subaltern group in the politic of sea side reclamation development in Makassar city. Subaltern may be defined as suppressed, inferior and powerless subject in representing the subjects themselves. The dynamic of development in urban areas is strictly attached to the management of the leading regime which produces urban political planning. The development vision of Makassar city to combine the concept of world city and local wisdom is more less a series of sustainable development of old city developed in the perspective of developmental colonialism and recently restructured in that of economic imperialism. When development is correlated with surplus achievement, the result may be twofold. In one hand, it will create new wealthy parties, while at the same time, communal poverty and misery is frequently an immediate consequence of the development itself. Indeed, development is not merely provided by nature. It is an unavoidable consequence of political process and negotiation by political actors, which may involve intrigues, fight for interest, and chase of power with political implications.

Keywords:

Development, Sea Reclamation, Subaltern

Pendahuluan

Pembangunan merupakan keniscayaan dalam dinamika kehidupan dan perkembangan manusia bahkan hampir tidak mungkin memisahkan pembangunan dengan kehidupan manusia. Pembangunan hingga saat ini senantiasa diyakini sebagai jalan yang harus ditempuh oleh manusia untuk mengembangkan kualitas dalam sistem kehidupan mereka, meski kehadirannya seringkali sangat beragam pada tiap-tiap konteks masyarakat. Olehnya itu wacana pembangunan seakan tidak pernah terhenti untuk terus diproduksi dan direproduksi, hingga memenuhi ruang-ruang pertarungan wacana mulai dari yang klasik, tradisional, modern, ketergantungan, poskolonial,

poststruktural dan sebagainya. Dengan kata lain pertarungan wacana pembangunan berjalan seiring dengan usia pembangunan itu sendiri.

Pembangunan selalu diidentikkan dengan kemajuan, kesejahteraan dan kekayaan, tidak jauh dari motif ekonomi.¹ Secara umum proses pembangunan dilihat sebagai suatu keharusan dan senantiasa dianggap sebagai hal yang positif.² Pembangunan pun turut disandingkan dengan perkembangan peradaban yang manusia disebabkan sekaligus melahirkan modernitas. Keberadaan pembangunan sangat mudah ditemukan pada komunitas masyarakat yang senantiasa berkembang seperti pada masyarakat perkotaan.

Perkotaan merupakan suatu wilayah yang didiami oleh beragam manusia dengan latar belakang yang berbeda. Hal ini menjadikan proses pembangunan juga terkait dengan keragaman latar belakang dan konteks-konteks masyarakat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sering kali beberapa kebijakan atau kegiatan pembangunan yang terjadi pada masyarakat kota yang mestinya dipandang sebagai suatu harapan bagi pencapaian kehidupan yang lebih baik dan sejahtera justru mendapat kritikan dan bahkan perlawanan dari masyarakat kota itu sendiri.

Secara umum kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap maraknya produksi ruang atas nama pembangunan adalah kelompok atau masyarakat yang terpinggirkan oleh sebuah kebijakan. Salah satu kajian yang membahas tentang kelompok-kelompok yang terpinggirkan di ranah publik dewasa ini adalah *subaltern*. Menurut Gayatri Spivak dalam tulisannya *can subaltern speak?*. *Subaltern* adalah subjek yang tertekan, atau yang lebih umum mereka yang berada digolongan inferior³. Kelas *subaltern* disamping tertindas juga tidak memiliki akses kepada kaum elit dan cenderung terabaikan.

Tulisan ini merefleksikan laju pembangunan di Kota Makassar dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Dalam bentangan waktu tersebut Kota Makassar mengalami ‘pembangunisasi’ fisik yang cukup gencar. Kebijakan pembangunan hadir seiring dengan visi para pengambil kebijakan mewujudkan kota yang terbesar di kawasan

¹ Rita Abrahamsen, *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*, (Yogyakarta: Lafad: 2000) h.2

² Huggan.G and Tiffin.H, *Postcolonial Ecocriticism, Literature, Environment*, (New York, Routledge, 2010) h.8

³ Leela Gandhi, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, (Yogyakarta: Qalam. 2006), h. 1

Indonesia bagian timur ini menjadi kota dunia. Salah satu proyek paling menonjol di area reklamasi pantai adalah kehadiran mega proyek *Centre Point of Indonesia* (CPI). Berbagai proyek pembangunan memang telah dan sedang digalakkan pemerintah dengan menggandeng para investor, kini dengan mudahnya kita menjumpai pusat perbelanjaan, gedung pertemuan, rumah sakit bertaraf internasional, hotel berbintang, serta beberapa kawasan lainnya yang kini sedang dibangun di atas tanah reklamasi. Namun di balik proyek-proyek pembangunan dan pengembangan perkotaan itu, ratusan penduduk yang sebagian besar menggantungkan hidup sebagai nelayan seakan tidak berdaya dengan kehidupan yang makin terjepit, akses mendapatkan sumber penghidupan selama bertahun-tahun secara otomatis terbatas. Mereka para nelayan itulah aktor *subaltern* dalam massifnya produksi ruang di pesisir Kota Makassar berwujud reklamasi pantai.

Subaltern : Genealogi Sebuah Konsep

Berdasarkan *Oxford English Dictionary*,⁴ istilah *subaltern* memiliki tiga arti yang berbeda: secara konvensional ia dipahami sebagai sinonim dari subordinat, namun bisa juga berarti kelas pekerja rendah dalam ketentaraan, atau contoh khusus proposisi universal dalam logika filsafat.

Istilah *subaltern* mula-mula digunakan dan diperkenalkan oleh seorang Marxis Italia Antonio Gramsci sebagai kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa melalui risetnya mengenai kaum petani desa Italia dan sejarah pemberontakan *subaltern* di Asia Selatan pada masa kolonial dan poskolonial. Gramsci menggunakan istilah *subaltern* secara bergantian dengan ‘subordinat’ dan ‘instrumental’ untuk mendeskripsikan ‘kelompok atau kelas yang non-hegemonik’.⁵

Awalnya cukup sulit memahami perbedaan sistematis antara cara Gramsci menggunakan kata *subaltern* dan subordinat, beberapa beranggapan Gramsci menggunakan istilah itu untuk sebagai kode-kata untuk menghadirkan istilah yang lebih populer dari istilah Marxis Proletar. Namun seiring perkembangannya pilihan kata

⁴ Selengkapnya dapat dilihat dalam <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/subaltern>, diakses tanggal 21 Februari 2016, Pukul. 08.15 Wita

⁵ Gayatri Spivak, *Etika, Subaltern, dan Kritik Penalaran*, (Yogyakarta, Pararaton, 2008) h.156

subaltern kelihatannya memang lebih tepat untuk mengartikan subordinat seperti kaum petani desa di Italia selatan, yang pencapaian kesadaran sosialnya dan politiknya terbatas dan kesatuan politik yang lemah. *Subaltern* sangat berbeda dengan proletar industrial karena *subaltern* belum memiliki kesadaran kolektif mengenai penindasan secara ekonomi dan politik sebagai sebuah kelas.

Fase awal gerakan nasionalis India, merupakan contoh pendekatan kajian *subaltern* yang secara terus menerus menentang elitisme historiografi nasionalis borjuis, yang berakar dari ideologi kolonial Inggris. Hal yang diabaikan oleh historiografi elit menurut Ranajit Guha⁶ adalah ‘politik rakyat’ atau ranah politik India saat itu dimana aktor-aktor pentingnya membentuk *subaltern* dari populasi kerja di kota dan di desa yaitu ‘rakyat’, namun bukan berarti kajian *subaltern* secara otomatis disamakan dengan rakyat. Menanggapi hal itu Spivak dalam “*scattered speculations on the subaltern and the popular*”, menegaskan *subaltern* adalah nama dari ruang perbedaan. Walaupun diawal Guha mengatakan bahwa kata ‘rakyat’ dan ‘subaltern’ bisa saling menggantikan, tapi itu bukan poin yang substantif bagi Spivak, karena Menurut Spivak, secara krusial “subalternitas merupakan posisi tanpa identitas”.⁷

Seiring dengan perkembangannya kajian-kajian *subaltern* berkembang yang pada prinsipnya peduli pada riset tentang praktik-praktik sosial dan politik kelompok-kelompok yang tidak mampu merepresentasikan diri mereka sendiri sebagai kelas atau kelompok sosial dalam historiografi elit (negara) dan hal yang penting lainnya perlu ditekankan bahwa kajian *subaltern* tidak dapat dilepaskan dengan berbagai gagasan dan konsep yang membentuknya yaitu poskolonial dan politik identitas.

Pembacaan akan problematika pembangunan Kota Makassar memang tidak dapat dipisahkan dari pendekatan poskolonial. Studi Poskolonial menurut Said awalnya ditandai dengan perspektif Barat memandang Timur.⁸ Jangkauan luar biasa imperialisme Barat abad ke-19 dan ke-20 menjadi fakta yang menakjubkan dalam sejarah politik dimana kebudayaan dan politik pada kasus kolonialisme telah bekerja sama, secara sengaja ataupun tidak, melahirkan suatu sistem dominasi yang melibatkan

⁶ Ranajit Guha, ed. *Subaltern Studies: Writing on South Asean Society*, (New Delhi, Oxford University Press, 1982)

⁷ Gayatri Spivak, *Etika, Subaltern, dan Kritik Penalaran*, h.159

⁸ Edward Said, *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur Sebagai Subjek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.6

bukan hanya meriam dan serdadu tetapi suatu kedaulatan yang melampaui bentuk-bentuk, kiasan dan imajinasi penguasa dan yang dikuasai. Hasilnya adalah suatu visi yang seakan menegaskan bahwa bangsa Eropa bukan hanya berhak, melainkan wajib untuk berkuasa.

Dalam dunia poskolonial sekarang ini, Said (1994) mengajukan sanggahan terhadap argumen-argumen yang mengatakan bahwa kebudayaan dan identitas nasional adalah entitas-entitas yang tunggal dan murni, dengan melucuti pengertian 'kita' dan 'mereka' praktik-praktik imperialis memerankan hegemoninya.⁹ Visi membangun kota dunia yang berkearifan lokal, yang menjadi nafas kota Makassar saat ini tidak lebih dari sebuah cerita keberlanjutan dari kota lama yang dibangun oleh kolonial dengan perspektif kolonial tentunya. Dengan kata lain motif ekonomi tentu saja tidak terlepas dari tujuan dominan dari proses imperialisme dan kolonisasi melalui surplus ekonomi.

Hal yang sama terlihat pada perilaku elit sosial dan elit politik (pemerintah) pribumi kota Makassar, pengadopsian perilaku masyarakat kolonial memunculkan terminologi poskolonial sebagai *mimikri*, suatu sikap peniruan yang dulunya ditentang, tetapi kemudian ditiru dan dipraktikkan. Secara umum kondisi ini pernah diketengahkan oleh Thee Kian Wee (1984) sebagai salah satu dampak negatif kolonialisme di Indonesia.¹⁰ Kini, siapapun akan mengakui, melihat Makassar yang ada sekarang pasti akan jauh berbeda dimana perkembangan mutakhir Kota Makassar saat ini tumbuh menjadi kota modern dengan imperatif-imperatif ekonomi yang semakin dominan.¹¹ Massifnya pembangunanisasi berjaln kelindan dengan sederet jargon kota dunia, kota niaga, *smart city*, *sombere city*, menyertai gencarnya aktifitas ekonomi berlangsung. Disaat yang sama banyak hal yang juga dikorbankan, mulai dari ruang publik, situs sejarah, hingga peminggiran masyarakat atas kuasa modal. Ketika pembangunan berkorelasi dengan pengejaran surplus, pada saat yang sama tidak saja menerapkan cara tertentu untuk untuk menciptakan kekayaan, tetapi juga diciptakannya kemiskinan dan kesengsaraan sebagai bagian integral yang *harus* ada dalam 'pembangunan' itu sendiri.

⁹ Edward Said, *Culture and Imperialism*, London: Vintage, 1994

¹⁰ Muhammad Ridha, *Sosiologi Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi Perempuan di Mall*, Resist Book, Yogyakarta, 2012, h.35

¹¹ Muhammad Ridha, *Sosiologi Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi Perempuan di Mall.....*, h.36

Mereka adalah kaum miskin kota, para nelayan yang tertindas yang tidak punya kuasa, jangankan untuk melawan, untuk merepresentasikan diri mereka saja mereka lemah akibat kesadaran kolektif yang terhegemoni. Beberapa tahun terakhir ‘atraksi’ pembangunan dan pengembangan Kota Makassar berlangsung di wilayah pesisir kota. Pantai Losari yang menjadi ikon kota kini ‘disulap’ cantik untuk memperlancar laju bisnis di kawasan ini. Sejak tahun 1997 masyarakat nelayan Mariso misalnya, telah diresahkan dengan proyek pembangunan jalan Metro Tanjung Bunga, kala itu proyek ini dianggap sebagai pilihan rasional pemerintah guna mengurangi beban jalan poros Sultan Alauddin yang sangat padat menuju Kabupaten Takalar, meski pemanfaatannya baru pada tahun 2002. Hasil penelitian Feri Daud Biang (2008)¹² menggambarkan dampak yang dirasakan oleh para nelayan akibat pembangunan jalan metro sangat besar, penurunan kualitas lingkungan di perairan teluk Losari, ditandai dengan berkurangnya hasil-hasil laut, hingga berlanjut pada konflik pemanfaatan lahan dan terjadinya alih profesi pekerjaan nelayan sebagai pilihan untuk terus bertahan hidup. Mereka yang masih bertahan kala itu, saat ini kembali menghadapi problematika pembangunan CPI yang kembali ‘mengganggu’ kehidupan mereka yang sudah serba terbatas.

Rezim Perkotaan

Politik perkotaan menjadi kajian fenomenal dari politik pembangunan dalam beberapa waktu terakhir. Dinamika pembangunan di perkotaan tidak terlepas dari tata kelola rezim pemerintah yang melahirkan pemikiran politik perkotaan. Dalam pembangunan, pengembangan perkotaan tidak terlepas dari strategi pengaturan perkotaan dijalankan. Berdasarkan sudut pandang politik, politik perkotaan yang umumnya berkembang di kawasan pinggiran perkotaan yakni dalam tahap suburbanisasi masih berada dalam rezim perkembangan (*developmental regime*) dan belum memiliki rezim tersendiri¹³

Teori rezim perkotaan pada dasarnya untuk menjelaskan aktor politik dan aktor ekonomi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini kebijakan perkotaan didorong

¹² Feri Daud Biang, Dampak pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Terhadap Komunitas Makassar, *Tesis*, Magister Lingkungan Hidup, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

¹³ Nicholas A. Phelps, *The Growth Machine Stop? Urban Politics and The Making and Remaking of an Edge City*, *Urban Affair Review*, h. 672

oleh kebutuhan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Stone¹⁴, politik dalam perkotaan tidak sepenuhnya melihat siapa yang memiliki kendali penuh (berkuasa) atas kehidupan perkotaan tetapi bagaimana kekuasaan dihadirkan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan hubungan antara pranata-pranata yang saling berinteraksi di dalam kehidupan sosial di perkotaan. Hal ini semakin membuka ruang 'kerjasama' institusi politik (pemerintah) dan intitusi ekonomi dalam meningkatkan *governability* untuk menunjang perkembangan perkotaan.

Alhasil, politik perkotaan yang memiliki tujuan pembangunan perkotaan, pada akhirnya tidak lebih dari 'ajang' bertemunya kepentingan-kepentingan dan konstelasi politik lokal yang terjadi dalam permasalahan perkotaan, selain aktor swasta dan pemerintah tak terkecuali peran kontestasi kepentingan di ruang parlemen turut memberikan kontribusi kepentingan politik perkotaan. Setidaknya, dinamika politik lokal ini mempengaruhi bagaimana kemudian arah kebijakan politik kota akan berjalan dan berinteraksi. Karena pada kenyataanya, konstelasi politik atas nama kepentingan rakyat diklaim sebagai sebuah kepentingan yang mengarah pada kepentingan pembangunan perkotaan, akhirnya juga tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan politik praktis secara riil. Hal ini menjadi utama mengapa pada saat yang lalu Ranperda Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 dalam proses penetapannya menjadi peraturan daerah membutuhkan waktu yang sangat lama (bahkan berlarut-larut) tidak lain karena sarat dengan beragam kepentingan.

Pembangunan Pesisir dan Kebijakan Reklamasi Pantai

Pembangunan bukanlah sesuatu yang tersedia oleh alam atau terlahir secara alamiah, tetapi pembangunan adalah hasil dari proses politik oleh aktor-aktor politik yang di dalam proses tersebut terdapat intrik, kepentingan, hingga perjuangan-perjuangan yang memberikan implikasi-implikasi politik. Tidaklah mengherankan jika kemudian banyak studi pembangunan menempatkan peran pemerintah sebagai subjek utama pembangunan dan memperlakukan rakyat sebagai objek (penerima) pembangunan atau partisipan pembangunan. Sedikit telah diuraikan di atas, secara

¹⁴ Clarence N. Stone, *Urban Regime and Capacity to Govern: A Political Economy Approach*, *Journal of Urban Affair*, h.17

noormatif jelas memiliki makna yang positif dengan jargon; untuk membangun, demi perbaikan, namun pembangunan juga mengandung berbagai kepentingan tentang bagaimana orang, kelompok negara campur tangan internasional ingin mencapai tujuannya dalam pembangunan yang diinginkan agar kepentingan-kepentingannya diakomodasi.

Tidak berlebihan jika pakar pembangunan seperti Mansour Faqih menyebutkan bahwa diskursus pembangunan adalah persoalan sosial dan politik. Konsep pembangunan tergantung pada kekuasaan hegemoni dominan baik di tingkat lokal, regional maupun global.¹⁵ Jika pembangunan dipahami sebagai arena politik, maka sesungguhnya aktor di dalamnya memiliki kecenderungan untuk meraih kekuasaan melalui hegemoni yang dimilikinya sehingga bisa mengendalikan individu, atau kelompok bahkan negara atau negara lain. Pada tingkat lokal misalnya, para aktor maupun pemilik hegemoni kekuasaan berperan aktif dalam pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan sampai pada tahap implementasi pembangunan.

Salah satu kebijakan pembangunan yang sudah digalakkan di Kota Makassar adalah pembangunan wilayah pesisir. Berawal dari kebutuhan akan lahan pada pesisir Makassar yang dapat digunakan sebagai ruang publik yang dapat menampung berbagai aktifitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, maka pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan ruang publik dengan membangun ruang publik di pesisir pantai sebelah barat Kota Makassar atau yang lebih akrab dikenal dengan Pantai Losari .

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan yang semakin sempit di wilayah pesisir adalah dengan melakukan reklamasi pantai. Terdapat beberapa definisi terkait reklamasi pantai, Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Dalam UU No. 27 Tahun 2007 pasal 34 juga disebutkan reklamasi hanya bisa dilakukan apabila manfaat ekonomi dan sosial lebih besar dari biaya ekonomi dan biaya sosial. Namun demikian pelaksanaan reklamasi juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti: a). Keberlanjutan dan

¹⁵ Warjio, *Politik Pembangunan : Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi*, Jakarta, Kencana, 2016, h. 97

penghidupan masyarakat; b). Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir; c). Memenuhi persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.¹⁶

Sedangkan berdasarkan Permen PU No. 40 Tahun 2007, Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa tehnik untuk pengembangan kawasan baru, sementara menurut Ensiklopedi nasional Indonesia (1990) reklamasi adalah suatu kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau areal yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan.¹⁷ saat ini pasca reklamasi pantai (Losari) telah berdiri tiga anjungan yang diperuntukkan sebagai ruang publik.

Proyek reklamasi lainnya mengarah ke arah selatan (CPI), proyek ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui SK Gubernur No. 644/ 2013 tentang pemberian ijin reklamasi pantai di kawasan pantai Losari sebagai bagian dari CPI. Proyek ini tidak lepas dari penancangan Presiden RI tahun 2009 tentang Kota Makassar sebagai kawasan strategis nasional dengan rencana proyek pembangunan wisma negara di lokasi Tanjung Bunga, disisi lain Kota Makassar juga ditetapkan sebagai kawasan minapolitan melalui keputusan menteri kelautan dan perikanan melalui Permen No. 32/MEN/ 2010.¹⁸ Untuk pembangunan CPI diperkirakan luas area yang diakuisisi untuk pembangunan megaprojek reklamasi tersebut seluas 157 hektar, 57 hektar diperuntukkan untuk pembanguan ruang publik, 100 hektar lebihnya yang saat ini dimiliki oleh pengembang Ciputra Group mealui PT Ciputra Surya. Tbk menggandeng PT Yasmin Bumi Asri, sang pemenang tender diperuntukkan untuk pengembangan kawasan bisnis, perhotelan dan real estate.¹⁹ Saat ini pemerintah telah menambahkan rencana pembangunan masjid CPI dengan 99 kubah yang pemancangan tiang perdananya telah dilakukan pada Juni 2017.

Tapi aktifitas produksi ruang yang massif tersebut berimbas pada pencemaran terhadap lingkungan, pencemaran terjadi akibat pembangunan pemukiman dan

¹⁶ Akhiruddin Marrung Jaya dkk, Kajian Kondisi Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Reklamasi Pantai Losari dan Tanjung Bunga, *Thesis*, Fak.Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, 2015

¹⁷ Meitharisha Fakhdiyar, Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Reklamasi Pantai Untuk Kawasan Ruang Publik, *Penelitian*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2015.

¹⁸ Analisis Karakteristik Sumberdaya Pesisir Kota Makassar, Pusat Riset Kelautan, Badan Riset dan Sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan perikanan RI, 2013

¹⁹ Wahyu Chandra, Tolak Reklamasi, Walhi Gugat Gubernur Sul-Sel ke PTUN, dalam www.mongabay.co.id, diakses tanggal 21 Februari 2016

industrialisasi. Hasil penelitian Marrung Jaya dkk²⁰ menemukan bahwa pencemaran akibat reklamasi pantai telah terjadi di Kota Makassar berdampak pada menurunnya mutu perairan / kualitas air laut di pantai Losari sehingga tidak dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, Menurunnya kondisi perairan lokasi tersebut berimbas pada menurunnya keragaman jenis biota laut akibat tercemar kandungan bahan logam berat dan organik. Ketika hal ini terjadi maka nelayan lah yang paling dirugikan, tidak saja karena akses laut lepas yang tertutup (terbatas), mengingat kawasan CPI akan menimbun laut sebanyak 22 juta ton meter kubik, secara otomatis berpotensi mengubah pola arus laut karena adanya daratan buatan. Menurut Haswandi pencemaran yang menyebabkan air menghitam dan beraroma tidak sedap akibat banyaknya sampah, berimbas pada menurunnya kuantitas dan kualitas biota laut seperti ikan, kerang, kepiting yang biasanya diakses oleh nelayan sebagai sumber ekonominya.²¹ Akibatnya terjadi penurunan pendapatan bagi nelayan.²² Hal menarik lainnya meski perijinan proyek CPI tengah diusut oleh anggota DPR, Pemerintah Provinsi Sul-Sel terus melanjutkan pembangunan CPI.

Pergulatan Nelayan Subaltern

Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi laut yang besar. Secara geografis wilayah pesisir Kota Makassar berbatasan langsung dengan Selat Makassar, dengan garis pantai sepanjang 32 km. Disamping itu kota ini juga memiliki gugusan pulau-pulau karang yang sebanyak 12 pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde.

Potensi laut yang besar secara otomatis akan memberikan keuntungan yang besar pula bagi lingkungan kehidupan sekitar pesisir, dalam hal ini kehidupan masyarakat nelayan. Namun tentu akan lain realitanya jika di area pesisir terjadi kapitalisasi produksi ruang yang massif seperti reklamasi. Pengembangan pesisir dengan membuka jalan lurus dari Pantai Losari ke arah Tanjung kala itu dianggap

²⁰ Akhiruddin Marrung Jaya dkk, Kajian Kondisi Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Reklamasi Pantai Losari dan Tanjung Bunga, *Thesis*, Fak.Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, 2015

²¹ Lihat dalam www.merdeka.com, di makassar, laut mati gara-gara reklamasi pantai

²² Lihat Akhiruddin Marrung Jaya dkk, Kajian Kondisi Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Reklamasi Pantai Losari dan Tanjung Bunga, *Thesis*, Fak.Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, 2015

menjadi pilihan pemerintah paling tepat, mengingat pembangunan Kota Makassar sudah padat tinggal memanfaatkan pesisir.²³ Di balik berbagai proyek pengembangan terdapat ratusan jiwa yang menggantungkan hidupnya dari nelayan. Kehidupan masyarakat pesisir (nelayan) pun semakin termarginalkan.

Masyarakat pesisir seperti diketahui umumnya cukup dekat dengan kemiskinan, menurut Endang (2011) karena faktor ekonomi dan sosial sehingga mereka sulit mendapatkan pendidikan yang memadai, akhirnya menjadi satu alasan untuk memilih menjadi nelayan.²⁴ Menurut Mubyarto, masyarakat berprofesi sebagai nelayan pada umumnya mempunyai tingkat kehidupan yang lebih miskin dari masyarakat petani atau pengrajin. Hal ini dapat dilihat dari indikator pemukiman yang ditempati cenderung lebih kumuh dengan tampilan yang cukup memprihatinkan karena terkondisikan dengan pantai (pesisir). Sedangkan menurut Monintja dan Yusfiandasyani, nelayan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, nelayan dihadapkan pada tantangan yang berat, kerasnya alam membutuhkan fisik yang jauh lebih kuat. Bagi nelayan yang sudah relatif menua tentu akan berpengaruh pada pendapatannya.²⁵

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang memiliki mata pencaharian menangkap ikan. Berdasarkan kepentingan dan latar belakangnya nelayan dibedakan sebagai berikut: nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan peusaha penangkapan ikan dengan hak atau berkuasa atas kapal / perahu dan / atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Sedangkan Nelayan penggarap adalah (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan pada umumnya merupakan / membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan hasil penjualan ikan.²⁶ Sementara nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan itu, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun terbatas biasanya hanya berjarak beberapa mil

²³ Eko Rusdianto, Mereka yang Terimbas Reklamasi, dalam www.mongabay.co.id, diakses tanggal 3 Februari 2016

²⁴ Endang Retnowati, Nelayan Indonesia dalam Pusaran kemiskinan Struktural, *Perpektif*, Vol. XVI, No.3 Tahun 2011 Edisi Mei

²⁵ Feri Daud Biang, Dampak pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Terhadap Komunitas Makassar, *Tesis*, Magister Lingkungan Hidup, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

saja dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya sifatnya turun temurun melakukan penangkapan ikan semata untuk mencukupi kebutuhan hidupnya²⁷.

Profesi nelayan tradisional inilah yang menjadi aktor *subaltern* ketika wilayah yang menjadi tempat mengais sumber-sumber penghidupannya dihilangkan untuk dijadikan daratan, maka pembangunan dengan atau atas nama publik sekalipun secara otomatis akan semakin meminggirkan mereka. Demikian kata atau wacana publik di negara berkembang menurut Amalinda Savirani masih sangat cair, tidak lebih dari arena pertempuran kekuasaan, perebutan ruang, saling menyingkirkan dengan variasi makna yang lebih beragam lagi.²⁸ Persoalan Publik yang merupakan elemen terpenting dalam gagasan demokrasi David Beetham dimana “urusan yang menyangkut hajat hidup warga kebanyakan” mengalami pergeseran, ketika isu “publik” diperbincangkan amat sangat riuh, namun akhirnya pemerintah jualah yang memiliki definisi terakhir tentang sebuah kebijakan.²⁹ Artinya, tidak ada kaitan antara semakin meningkatnya ruang publik untuk berekspresi dengan terkaitnya ekspresi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Ironis, negara yang seharusnya hadir atas nama publik tetapi ‘tersandera’ oleh kepentingan pembangunan atas nama intitusi politik dan institusi ekonomi.

Nelayan menjadi *subaltern*, mereka tidak punya daya dan kekuatan melawan korporasi besar bernama PT. Ciputra, PT. Yasmin apalagi negara. Alhasil pembangunan megaprojek CPI menyisakan cerita pengusiran nelayan secara paksa tanpa kompensasi pada 10 Maret 2014, saat itu juga bangunan pemukiman nelayan menjadi rata dengan tanah. Sebelum eksekusi dilakukan pemerintah provinsi sudah tiga kali memberikan batas waktu untuk para nelayan meninggalkan wilayah yang telah mereka diami puluhan tahun.³⁰

Angin segar bagi nelayan tatkala Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) yang mewakili WALHI mengugat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke PTUN Makassar pada tanggal 29 Januari 2016 dengan nomor perkara: No. 11/6/2016/PTUN.MKS

²⁷ Endang Retnowati, Nelayan Indonesia dalam Pusaran kemiskinan Struktural, *Perpektif*, Vol. XVI, No.3 Tahun 2011 Edisi Mei

²⁸ Amalinda Savirani, Pertempuran Makna “Publik” dalam Wacana Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, *Prisma*, LP3ES, Vol.36, No.1, 2017, h. 112

²⁹ Amalinda Savirani, Pertempuran Makna “Publik” dalam Wacana Proyek Reklamasi Teluk Jakarta... h. 126

³⁰ <http://www.mongabay.co.id/2014/04/18/bangun-kawasan-industri-dan-wisma-negara-nelayan-makassar-diusir-kampung-dihancurkan/> diakses pada tanggal 3 Februari 2016

terkait perijinan proyek reklamasi Pantai Losari barat yakni lokasi proyek CPI seluas 157 hektar, tetapi PTUN menolak semua gugatan ASP dengan alasan tidak ada kepentingan publik yang dirugikan dalam objek sengketa serta tidak ada bukti kuat dari ASP jika telah terjadi kerusakan ekosistem.³¹

Apa yang dialami oleh masyarakat nelayan di atas adalah bentuk dari realitas / wajah poskolonial yang dimana mereka tidak terjajah secara langsung oleh pihak asing tetapi justru langsung oleh penguasa pribumi yang menindas, pengaruh kapitalisme disisi lain tidak bisa tidak dilihat sangat mempengaruhi bekerjanya praktek-praktek dominasi dan penindasan tersebut, alhasil kemakmuran hanya dimiliki oleh segelintir orang atau kelompok yang memiliki modal dan jaringan kekuasaan. Sekali lagi dalam kondisi seperti ini negara gagal jika terus menerus ditunggangi oleh ekonomi ekstraktif yang didukung oleh institusi politik yang ekstraktif pula sehingga menyumbat pertumbuhan ekonomi.³² Dimana ada institusi politik ekstraktif maka dipastikan akan ada institusi ekonomi yang ekstraktif pula, karenanya keberlangsungan institusi ekonomi yang ekstraktif sangat bergantung pada instutsi politik ekstraktif. Idealnya Institusi politik membagi kekuasaan secara merata ke seluruh elemen masyarakat, secara bersama-sama akan menumbangkan kekuatan institusi ekonomi yang ‘merampok’ aset dan sumber daya milik rakyat, bukannya malah membangun koalisi bersama (institusi politik dan institusi ekonomi) bersama-sama mengabaikan hak-hak rakyat.

Penutup

Pembangunan dimanapun seolah nyaris memiliki cerita yang sama, disisi lain selalu ada pihak yang dikorbankan, mulai dari ruang publik, situs sejarah, hingga peminggiran masyarakat atas kuasa modal. Ketika pembangunan berkorelasi dengan pengejaran surplus, pada saat yang sama tidak saja menerapkan cara tertentu untuk

³¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160728134314-12-147619/hakim-ptun-tolak-gugatan-reklamasi-makassar>, diakses tanggal 4 Februari 2016

³² Daron Acemoglu, James Robinson, *Mengapa Negara Gagal?: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan*, Jakarta, Gramedia, 2017, h. 86

untuk menciptakan kekayaan, tetapi juga diciptakannya kemiskinan dan kesengsaraan sebagai bagian integral yang *harus* ada dalam ‘pembangunan’ itu sendiri.

Kajian dunia ketiga kerap menceritakan nasib pembangunan yang punya cerita yang sama, pembangunan selalu ‘menganaktirikan’ masyarakat, terjadi pengingkaran negara atas hadirnya pembangunan, demokrasi mensaratkan orientasi mayoritas turut teringkari ketika produksi dan ruang-ruang produksi pembangunan di Kota Makassar diisi dan dikuasai oleh kelompok minoritas (elit) yang menginginkan kepentingannya tetap langgeng. Dengan demikian wacana pembangunan tidak bisa dianggap sebagai pengetahuan yang netral yang bebas nilai, atau terpisah dari relasi sosial dan struktur kekuasaan tempat ia melekat. Semakin parah ketika pembangunan terus diproduksi melalui seperangkat resep (kebijakan) penyelenggaraan pemerintahan (rezim perkotaan) yang dipaksakan demi kukuhnya sebuah legitimasi kekuasaan. Disisi lain kebijakan dipahami sebagai sebuah proses yang tidak berdiri sendiri, berbagai kepentingan berinteraksi disekitar proses terbentuknya sebuah kebijakan.

Daftar Pustaka

- Abrahamsen, Rita, *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: Lafadl: 2000
- Acemoglu Daron, James Robinson, *Mengapa Negara Gagal?: Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran dan Kemiskinan*, Jakarta, Gramedia, 2017
- Biang, Feri Daud, Dampak pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Terhadap Komunitas Makassar, *Tesis*, Magister Lingkungan Hidup, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Fakhdiyar Meitharisha, Kajian Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan Reklamasi Pantai Untuk Kawasan Ruang Publik, *Penelitian*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum, 2015.
- Gandhi, Leela *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, Yogyakarta: Qalam. 2006
- Guha, Ranajit, ed. *Subaltern Studies: Writing on South Asean Society*, (New Delhi, Oxford University Press, 1982)

- Huggan.G and Tiffin.H, *Postcolonial Ecocriticism, Literature, Environment*, New York, Routledge, 2010
- Jaya, Marrung Akhiruddin Marrung, *Kajian Kondisi Lingkungan dan Perubahan Sosial Ekonomi Reklamasi Pantai Losari dan Tanjung Bunga*, Thesis, Fak.Ilmua Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, 2015
- Phelps, Nicholas A. *The Growth Machine Stop? Urban Politics and The Making and Remaking of an Edge City*, *Urban Affair Review*
- Retnowati, Endang, *Nelayan Indonesia dalam Pusaran kemiskinan Struktural*, *Perpektif*, Vol. XVI, No.3 Tahun 2011 Edisi Mei
- Ridha, Muhammad, *Sosiologi Waktu Senggang: Eksploitasi dan Komodifikasi Perempuan di Mall*, Resist Book, Yogyakarta, 2012
- Spivak, Gayatri *Etika, Subaltern, dan Kritik Penalaran*, Yogyakarta, Pararaton, 2008
- Savirani Amalinda Savirani, *Pertempuran Makna "Publik" dalam Wacana Proyek Reklamasi Teluk Jakarta*, *Prisma*, LP3ES, Vol.36, No.1, 2017
- Said Edward, *Orientalisme: Menggugat Hegemoni Barat dan Mendudukkan Timur Sebagai Subjek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Said, Edward *Culture and Imperialism*, London: Vintage, 1994
- Stone, Clarence N, *Urban Regime and Capacity to Govern: A Political Economy Approach*, *Journal of Urban Affair*
- Warjio, *Politik Pembangunan : Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi*, Jakarta, Kencana, 2016
- <http://www.mongabay.co.id/2016/02/14/tolak-reklamasi-pantai-losari-walhi-gugat-gubernur-sulsel-ke-ptun/> , diakses 21 Februari 2016
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/di-makassar-laut-mati-gara-gara-reklamasi-mega-proyek-cpi.html>, diakses 3 Februari 2016
- <http://www.mongabay.co.id/2015/07/06/mereka-yang-terimbas-reklamasi-di-pesisir-makassar/> diakses 3 Februari 2016
- <http://www.mongabay.co.id/2014/04/18/bangun-kawasan-industri-dan-wisma-negara-nelayan-makassar-diusir-kampung-dihancurkan/> diakses tanggal 3 Februari 2016
- <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/subaltern>, diakses tanggal 21 Februari 2016.